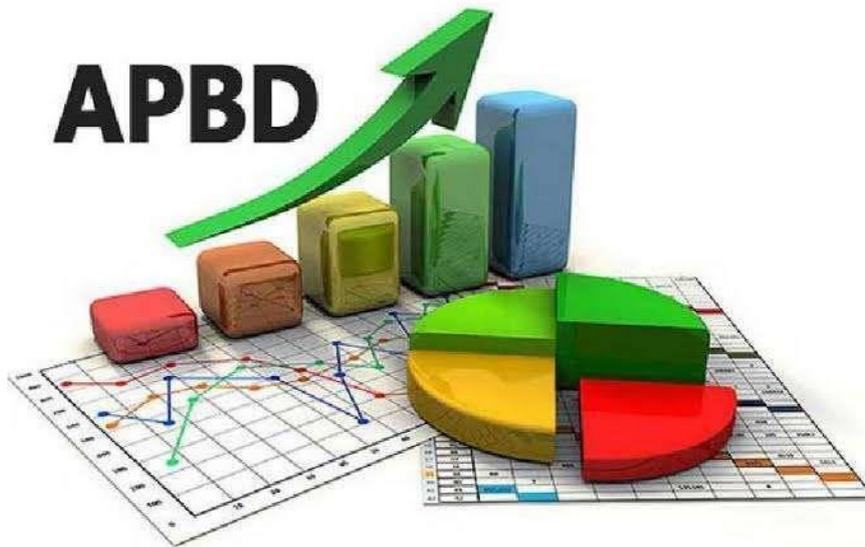


PEMKAB BATANG HARI SEPAKATI PERUBAHAN KUA PPAS 2025 DI RAPAT PARIPURNA DPRD



Sumber gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/62/images/1705874151110-i/ae4uftxoq7bmob6.jpeg>

BATANGHARI, AksesJambi.com - Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief bersama wakilnya H. Bakhtiar hadir dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor DPRD pada Jumat (13/06/2025). Hal ini menunjukkan komitmen penuh Pemkab Batang Hari dalam menjaga ritme dan kesinambungan program strategis daerah melalui penandatanganan nota kesepakatan ini.

Rapat prestisius ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Rahmad Hasrofi, didampingi oleh Wakil Ketua Hj. El Firsta Nopsiamti, dan Muhammad Firdaus. Seluruh anggota DPRD turut hadir, memperlihatkan kekompakan dan konsistensi lembaga legislatif dalam mendukung arah pembangunan yang akuntabel dan terukur.

Dari jajaran eksekutif, Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief bersama Wakil Bupati H. Bakhtiar hadir menyampaikan komitmen penuh dalam menjaga ritme dan kesinambungan program strategis daerah. Turut hadir unsur Forkopimda, perwakilan Polres, TNI, para kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS ini menjadi tahapan krusial dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang akan menjadi landasan kebijakan fiskal daerah dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Rahmad Hasrofi menyampaikan bahwa legislatif akan terus mendorong efisiensi dan ketepatan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat. “Penandatanganan Nota Kesepakatan ini adalah wujud keseriusan kita di legislatif untuk memastikan proses pembangunan daerah berjalan tepat arah dan tepat sasaran. Kami mendorong agar setiap rupiah dalam APBD benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan aktual di lapangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief, menekankan pentingnya adaptasi dan percepatan dalam merespons dinamika kebutuhan publik yang berkembang. “Perubahan KUA-PPAS ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam mengatur ulang prioritas pembangunan yang responsif terhadap dinamika masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga adil, inklusif, dan berdampak langsung bagi seluruh warga Batang Hari,” tegasnya.

Dengan semangat kolaboratif yang kuat antara legislatif dan eksekutif, Kabupaten Batang Hari kini bergerak pada jalur percepatan. Agenda pembangunan tidak lagi sekadar wacana, tetapi telah dirancang menjadi langkah konkret yang sistematis, terukur, dan berpihak pada kepentingan publik secara luas.

Langkah ini diharapkan mampu membuka ruang bagi peningkatan kualitas layanan publik, pemerataan infrastruktur, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Seluruh mata kini tertuju pada implementasi, sebab masyarakat tidak lagi menunggu janji, melainkan menantikan bukti. (Ag/*)

Sumber Berita:

1. <https://aksesjambi.com/news/14/06/2025/pemkab-batang-hari-sepakati-perubahan-kua-ppas-2025-di-rapat-paripurna-dprd/>, “Pemkab Batang Hari Sepakati Perubahan KUA PPAS 2025 di Rapat Paripurna DPRD”, 14 Juni 2025.
2. <https://www.batangharinews.com/read/2025/06/13/7824/-dprd-dan-pemkab-batang-hari-sepakati-rancangan-perubahan-kuappas-tahun-anggaran-2025>, “DPRD dan Pemkab Batang Hari Sepakati Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025”, 13 Juni 2025.

Catatan:

1. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat

rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

2. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 menyatakan bahwa:
 - (1) Angka 4
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.”
 - (2) Angka 22
“Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.”
 - (3) Angka 23
“Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.”
 - (4) Angka 24
“Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.”
3. Bab IV Bagian Kesatu PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur mengenai Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, pada Pasal 89 menyatakan bahwa:
 - (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.
- (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
4. Bab VII Bagian Kesatu PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur mengenai Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pasal 160 menyatakan bahwa:
 - (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
5. Lebih lanjut Bab VII Bagian Kedua PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur mengenai Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pasal 161 menyatakan bahwa:
 - (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.
 - (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;

- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
6. Bab VII Bagian Ketiga PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur mengenai Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, pada Pasal 162 menyatakan bahwa:
- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
 - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.
 - (2) Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
 - (3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
 - (4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:
 - a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - c. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
7. Lebih lanjut Bab VII Bagian Kedelapan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur mengenai penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada:
- 1) Pasal 169
 - (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- 2) Pasal 170
 - (1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
 - (2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan:
 - a. Program dan Kegiatan baru;
 - b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;
 - c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau
 - d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.
 - (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.
 - 3) Pasal 171
 - (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2).
 - (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.